WASPADA
Kamis
6 Maret 2014

SUARA AKADEMIK

Mentalitas Bupati Ijazah Palsu

Besarnya keinginan untuk menduduki jabatan kepala daerah menyebabkan para calon bupati/walikota melakukan tindakan apa saja termasuk memalsukan dan menggunakan ijazah palsu. Namun, buruknya prilaku para calon tersebut merupakan salah satu penyebab semakin besarnya tindak pidana korupsi.

Kasus penggunaan ijazah palsu merupakan indikator dan memperlihatkan betapa buruknya mentalitas para calon kepala daerah yang ikut bertarung dalam pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). Sedihnya, tindakan kejahatan menggunakan ijazah palsu itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi disepakati bahkan disokong oleh oknum KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilukada. Tanpa ada konsfirasi dengan KPU sangat kecil kemungkinan calon bersangkutan bisa lolos ikut dalam pertarungan.

Sungguh sangat kita sesalkan konsfirasi jahat yang dibangun oleh oknum KPU dengan calon kepala daerah menggunkan ijazah palsu. Harusnya, KPU sebagaimana amanat undang-undang melaksanakan tugas sesuai pasal 2 UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yakni; harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabelitas, efisiensi dan efektivitas. Namun, asas itu diabaikan demi kepetingan lain.

Memang sejak awal rekrutemen kandidat pengurus KPU sudah terasa ada bangunan konsfirasi dengan kepala daerah. Bahkan kepala daerah ikut menentukan siapa orang yang duduk menjadi anggota komisioner, hal itu dilakukan dalam upaya memuluskan keinginan ke depan.

Berbagai modus yang dapat dilakukan oleh calon kepala daerah dalam meloloskan penggunaan ijazah paslu selain melakukan konsfirasi dengan KPU. Misalnya, calon bupati bersangkutan mencalonkan diri ikut pilkada tahun 2008 meminta surat keterangan kehilangan ijazah dari Polsek Percut Sei Tuan di Medan sebagai pengantar untuk mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang berhak mengeluarkannya. Kemudian KPU melakukan investigasi ke Solo, Jawa Tengah, untuk memastikan apakah calon bupati besangkutan pernah sekolah di sana atau tidak. Padahal, yang menjadi persoalan bukan sekolah atau tidak, tapi adalah keabsahan ijazah.

Kemudian, pada pimilukada 2013, bupati bersangkutan kembali mencalonkan diri dan meminta surat keterangan kehilangan ijazah yang sama dari Poslek Lamapuluh di Batubara. Jadi, ada dua kali kehilangan ijazah yang sama dan meminta surat keterangan hilang di dua polsek. Lantas untuk memperkuat bahwa benar telah menjalani pendidikan, salah satu sekolah pavorit di Medan mengeluarkan surat keterangan pernah bersekolah di sekolah tersebut. Kita masih ragu, mungkin-mungkin murid duluan lahir sementara sekolah belum beroperasi. Jika itu yang terjadi, sekolah bersangkutan sudah melakukan pembohongan publik dan harus mendapat tindakan.

Dengan anggota KPU yang sama, calon kepala daerah bersangkutan lolos ikut pemilukada dengan berkas yang sama. Itu artinya, KPU telah melakukan kesalahan berulangkali sehingga merugikan hak orang lain yang ikut bertarung dalam pimilukada tersebut.

Jadi, masyarakat jangan berharap banyak akan terjadi perubahan yang lebih baik jika ketika pencalonan saja calon kepala daerah bersangkutan sudah melakukan tindakan yang tidak jujur. Padanan orang tidak jujur adalah berbohong sedang teman berbohong adalah pencuri. Itu artinya, jika seorang kepala daerah sudah berbohong, identik dengan pencuri dan jika suatu daerah dipimpin oleh pencuri sampai kapanpun masyarakatnya tidak akan pernah berubah kepada keadaan yang lebih baik bahkan masyarakat akan dibawanya untuk bersama-sama mencuri paling tidak bersubahat jika tidak ada diantara golongan masyarakat yang mencegahnya.

Jika seorang calon kepala daerah dari awal sudah dimulai dari yang palsu, maka bicaranya, perbuatannya dan hatinya diyakini akan palsu. Dalam agama Islam orang seperti itu disebut ciri-ciri orang munafik dan orang munafik sangat dibenci Allah SWT karena lebih berbahaya dan ditakuti dari pada orang kafir. Orang munafik selalu 'menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut', disangkah kawan rupanya lawan, zahirnya baik tapi bathinnya berkhianat. Ciri mentalitas bupati ajazah palsu, pekerjaan pembangunan tidak ada yang jelas mana yang prioritas dan tidak, harusnya membangun kantor sebagai pusat pemerintahan malahan menata pulau, potensi yang dekat dan jelas diabaikan yang jauh ditunggu-tunggu.

Semua itu kembali kepada masyarakat sejauh mana menilai keberadaan sosok pemimpinnya. Apalagi pada dasarnya, masyarakat adalah pengguna, jika yang digunakan tidak mampu menciptakan perubahan untuk perbaikan, ibarat pakaian tidak akan ada gunanya lagi. Apalagi jika pakaian yang seharusnya menjadi pelindung serta menjadikan kita cantik, sehat dan menarik, ternyata mendatangkan masalah dan malapetaka serta murka Allah, tidak ada alasan lain bahwa pakaian itu harus dibuang jauh-jauh.

Bagaiman kalau saja masyarakat masih tetap menggunakan pakaian yang tidak lagi melindungi dirinya, serta menjadikan kita tidak cantik, sehat dan menarik, dari perspektif agama Islam bahwa masyarakat seperti itu telah kufur dan Allah akan mendatangkan azab.Tetapi, jika tidak, Allah akan menambahkan nikmatNya. Sekarang sebagai orang yang beriman, mana yang harus dipilih, thaat atau khufur. Pihak kepolisian dan PTUN harus menindak tegas sesuai fakta jika menangani kasus ijazah palsu. Semoga.

Dipindai dengan CamScanner